

BAB I

PENDAHULUAN

Peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Mebel dan Seni Ukir Kayu

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang semuanya berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, dimana dalam isi UUD tersebut tercantum aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD tahun 1945 juga mengatur dan membahas tentang Industri Perindustrian, yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 mengatur tentang perindustrian. Adanya undang-undang guna untuk meningkatkan perekonomian yang kuat melalui pembangunan dan pengembangan industri perindustrian yang maju dengan adanya dukungan dari sumber daya yang tersedia. Didalam Undang-Undang tertulis bahwa industri yang maju dapat diwujudkan dengan menguatkan industry, menjadi industri yang mandiri dan berdaya saing tinggi dengan cara mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya, sehingga dapat mengembangkan industri dan makin bisa membuka lapangan pekerjaan secara luas.

Selain itu Pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah sektor ekonomi. Pemerintah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan melihat potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakatpun menjadi sejahtera.

Yang utama dalam Era Globalisasi adalah mengurangi berbagai hambatan adanya perdagangan, pembangunan bagi masyarakat luas hal itu menjadi semakin penting karena akan meningkatkan daya saing bangsa. Acuan pembangunan industri dan perdagangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2000, yang terkait langsung dengan sektor industri dan perdagangan adalah mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan sumber daya yang produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi berkeunggulan kompetitif serta memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Industri dan perindustrian sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Masyarakatpun berfikir bahwa kawasan industri dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga mampu menaikkan daya saing usaha Indonesia ketingkat dunia. IKM juga berperan sebagai pelaku utama kegiatan – kegiatan ekonomi, penyedia kesempatan kerja dan penggerak ekonomi daerah serta masyarakat. IKM dapat dikatakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya juga dalam hal pendapatan.

IKM sendiri merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Jepara. Berbagai jenis industri mulai banyak memasuki kawasan pasar dan perdagangan misalnya Industri Mebel dan Seni Ukir Kayu yang berada di Kabupaten Jepara. Kabupaten yang terletak diProvinsi Jawa Tengah yang Ibu

Kotanya tepat pada Kota Jepara. Perbatasan Kabupaten Jepar yaitu Kabupaten Pati, Kudus dan Kabupaten Demak. Kabupaten Jepara sendiri merupakan salah satu Pulau Jawa yang terkenal dengan industry mebel dan ukir kayu, keanekaragaman budaya yang terkenal di daerah tersebut adalah ukiran kayunya hingga mendapat julukan “Jepara Kota Ukir”. Karena hampir semuanya di Kabupaten ini membuka dan menekuni industri ini hingga menjadikan sebuah pekerjaan dan tulang punggung perekonomian.

IKM Mebel dan Kerajinan Seni Ukir Kayu pernah mengalami masa-masa kemajuan hingga mencapai ke pasar ekspor dengan angka hampir mencapai 200 juta USD pertahun ke berbagai negara dunia (Sumber awal dari Surat Keterangan Asal s/d Nopember 2008 lalu diolah kembali oleh Asmindo Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Jepara). Adanya data tersebut terbukti bahwa dapat memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi hingga dapat memperluas kesempatan kerja

Melihat peranan IKM pada perekonomian yang semakin penting maka dibutuhkan perhatian besar dari para pengambil kebijakan, khususnya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perkembangan IKM ini. Mengutip dari artikel Kemenperin.go.id “Kawasan-Industri-Pacu-Pengembangan-Industri-Furnitur-Jepara” yang dirilis hari Sabtu tanggal 16 bulan April tahun 2016. Menurut Wakil Bupati Kabupaten Jepara Bp. Soebroto

“pemerintah kabupaten sudah meningkatkan dan menargetkan pembangunan kawasan industri terutama furnitur dan ukir kayu dimulai pada tahun 2017 mendatang. Adanya rencana tersebut berpotensi memperkuat industri Jepara, sehingga dapat menaikkan nilai ekspor dan import. Ukiran-ukiran Jepara termasuk salah satu kekayaan intelektual dengan kearifan lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah produk industri furnitur dan kerajinan kayu”

Adanya campur tangan dari Pemerintah terhadap IKM akan sangat berdampak pada keberlangsungannya . Seperti yang diungkapkan George J. Sitgler dalam Mandala Harefa (2008:206), “Bahwa regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksud untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”. Adanya regulasi Pemerintah Daerah diatur dalam Perda Jepara nomor 2 tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel. Yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai tersebut adalah :

- 1) Memperkuat industri mebel/furniture agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri.
- 2) Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal
- 3) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri furniture menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.
- 4) Meningkatkan kemampuan usaha industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan usaha industrinya.

Dalam mengembangkan sebuah IKM daerah tentunya kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dan potensi daerah tersebut, maka dari itu penting adanya identifikasi guna mengetahui potensi-potensi daerah yang nantinya dapat dimaksimalkan. Adanya potensi kerajinan industri tersebut di Kabupaten Jepara:

1. Industri kerajinan seni ukir kayu dan mebel macan kurung pada daerah Mulyoharjo.
2. Industri mebel/furniture yang berada di daerah Batealit.

3. Industri kerajinan seni ukir patih sungging yang berada di Kecamatan Tahunan.
4. Industri mebel dan ukiran kayu pada daerah Mlonggo.
5. Industri ukir kaligrafi dengan tempat di Bangsri.

Tabel 1.1
Data Potensi Industri
Kabupaten Jepara 2018-2019

No	Nama dan Lokasi Sentra	Indikator dan Perekembangan	Satuan Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Rasio Pertumbuhan
1	Sentra IKM Furniture dan Kerajinan Ukir Kayu	a. Jumlah Unit Usaha b. TK c. Volume Produksi	<u>Unit</u>	7,462	7,443	-0,25%
	Lokasi : Tersebar di beberapa Kec Kabupaten Jepara		(Bh/ Set)	8,115,436	8,095,147	-0,25%

Seiring berjalannya waktu industry mebel dan seni ukir kayu tampaknya mulai mengalami penurunan dan sulit untuk bertahan terutama untuk IKM. Adanya bukti penurunan sudah mencapai sekitar 50 persen jika dihitung dan dibandingkan pada masa keemasannya dulu. Berdasarkan jangkauan pemasaran, Industri yang ada di Kabupaten

Jejara saat ini masih dominan dalam cakupan lokal, dan hanya beberapa telah mencapai tingkat Internasional. Untuk IKM sendiripun juga mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor salah satunya sarana promosi dan sdmnya yang masih kurang. Tidak hanya itu sejak dekade tahun 2010an, tradisi seni ukir mengalami penurunan kebanyakan pengrajin dan peminat seni ukir mengukir di Jejara sumber daya manusianya didominasi oleh generasi tua, sedangkan minat generasi muda semakin menurun khususnya industri kecil menengah.

(Sumber : Disperindag)

Mengutip dari artikel Jejara.go.id “perajin-ukir-usia-muda-semakin-langka” yang dirilis pada tahun 2018 mereka menuliskan

“bahwa perajin dan peminat ukir kayu semakin langka. Alasannya, furniture dan kerajinan ukir kayu tidak memberikan jaminan masa depan yang layak pada mereka. Bahkan mereka(masyarakat) menyatakan bekerja dan menekuni ikm Garment lebih menggiurkan dan penghasilan digarment lebih banyak dan juga besar. Mereka juga rela menjual peralatan furniture dan ukirnya untuk membuka IKM Garment”

Mengutip dari artikel wawasan the next journalism “Masih gunakan cara manual, industry mebel Jejara tidak Efisien” yang dirilis 13 November 2018, 17.00 mereka menuliskan.

“Bahwa ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jejara, Ratib Zaini mengatakan Pelatihan teknik semprot ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha mebel di Jejara, Pemkab Jejara sendiri sudah berupaya untuk memajukan industry mebel dengan cara ini”

“Sedangkan untuk pelatihan teknis sampai saat ini sudah beberapa kali dilaksanakan, terakhir ya pelatihan teknik semprot”

Lalu didalam artikel bahwa kepala HIMKI (Himpunan dan Kerajinan Indonesia) Maskur Zaenuri membenarkan mahal nya proses produksi di Jejara. Penerapan teknologi baru yang lebih efisien belum sepenuhnya diterapkan. SDM mebel ukir di Jejara pun sejauh ini memang belum bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ya perlu dikenalkan lagi,

Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri sudah melakukan upaya meningkatkan dan menargetkan pembangunan kawasan industri sejak tahun 2016, telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan juga. Tetapi geregetnya hingga sekarang masih belum sehebat pada jamannya yang banyak sekali peminatnya. Pemerintah Kabupaten Jepara sudah menganggap bahwa Furniture dan Seni Ukir Kayu ini sebagai produk unggulan yang berada di Jepara, yang menjadikan ikon Jepara sebagai Kota Ukir, yang berarti sudah dianggap dan diakui sebagai salah satu unggulan produk Kabupaten Jepara.

Maka dari itu, Penulis disini mengambil judul penelitian tentang “ **Peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Mebel dan Seni Ukir Kayu** ” terhadap latar belakang yang sudah dijelaskan diatas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan pemberdayaan pelaku usaha IKM Mebel dan Seni Ukir Kayu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan IKM Mebel dan Seni Ukir diJepara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai fasilitator, regulator, katalisator dalam melakukan pemberdayaan IKM Mebel dan Seni Ukir Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam melakukan pemberdayaan IKM Mebel dan Seni Ukir diJepara.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai peran pemerintah khususnya peran pemerintah daerah dalam keikutsertaanya untuk mengembangkan IKM yang dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi bahan referensi serta bahan kajian pada penelitian penelitian selanjutnya dengan bidang yang lebih relevan.

b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor IKM sehingga dapat menunjukkan apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum

b) Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah mengenai bidang IKM baik dalam pembuatan kebijakan ataupun evaluasi kebijakan pada periode selanjutnya agar lebih efektif dan dapat memberikan dampak positif yang lebih banyak sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c) Bagi Masyarakat

Hasil adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program pemerintah yang

ditujukan untuk meningkatkan sektor IKM di Kabupaten Jepara, sehingga masyarakat mengerti tentang aturan-aturan khususnya pihak pelaku IKM sendiri.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disebut sebagai penelitian yang sudah ada dan sudah pernah dilakukan oleh seseorang dan kemudian menjadi referensi dalam penulisan penelitian yang berikutnya sehingga dapat membandingkan kenyataan yang berada di lapangan dengan teori yang mendukung. Dalam kajian pustaka yang dilakukan memiliki relevansi dengan penelitian ini.

a. Ida Rizkyani Nur (2017)

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dalam pemberdayaan UMKM Sentra Industri Konveksi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Hasil Penelitian : Melakukan pentingnya peran UMKM sendiri maka dari itu dibutuhkan pemberdayaan UMKM. Apalagi dengan adanya era industrial yang mengutamakan kemajuan teknologi. Pemerintah dalam memberdayakan UMKM harus menelaah dari berbagai aspek guna melindungi UMKM tersebut agar tetap bertahan baik secara modal, pengenalan iptek, pemasaran, pelatihan, pengelolaan dll. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di daerah setempat sudah terbantu dalam modal karena adanya koperasi bentukan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kudus, serta juga sudah adanya kerjasama yang terjalin antara Pemerintah daerah lainnya ataupun swasta dalam hal pemasaran produk. Selain Dinas Koperasi dan UMKM Kudus sendiri juga sudah berniat membangun SDM sehingga dapat mengelola dan mengembangkan UMKMnya masing-masing sehingga dapat bertahan dengan sendirinya.

Perbedaan dan persamaan : Perbedaan dalam penelitian ini lokus dan fokus. Lokus bertempat di Kudus sedangkan untuk fokus hanya dengan UMKM UMKM Sentra Industri Konveksi. Untuk Peersamaan mendeskripsikan peran pemerintah khususnya Disperindag dalam melakukan pemberdayaan pelaku usaha.

b. Distianto Agung D.N.P (2006)

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Cor Kuningan di Kabupaten Jombang.

Hasil Penelitian : Pemerintah Kabupaten Jepara telah melaksanakan tugasnya dalam mengembangkan UKM di bidang produksi pemasaran dan sumberdaya manusia. Pemkan Jombang telah menjalankan perannya sebagai fasilitator,katalis dan regulator. Partisipasi pelaku pengerajin kuningan cor juga telah terlibat secara aktif dalam rangka untuk mengembangkan UKM diwujudkan dalam kegiatan pengerajin yang mencerminkan partisipasi dalam perencanaan dan pemanfaatan hasil.

Persamaan dan Perbedaan : Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada peran pemerintah daerah. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada lokus dan topic penelitian ini membahas tentang UMKM karena penelitian ini membahas tentang kerajinan kulit di Kbaupaten Magetan, dan topiknya mengarah kepada partisipasi pelaku usaha UMK.

c. Muh Asran Labaran,Lukman Hakim,Rudi Hardi (2016)

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.

Hasil Penelitian : Dari penelitian dikatakan bahwa peran pemerintah tersebut dapat merealisasikan berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan sosial. Faktor pendukungnya adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao.

Persamaan dan Perbedaan : Persamaan penelitian ini adalah fokus terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya adalah Lokus yaitu Petani Kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Menurut Dewi (2011:2) menuliskan administrasi di Indonesia merupakan adopsi Belanda. Dalam bahasanya secara etimologi administrasi tentunya berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti **administrare melayani dan membantu**. Administrasi adalah *administration* yang bersal dari kata "**Ad**" dan "**Minstrare**" yang artinya *melayani*. Makna tersebut didapat dalam arti bahasa Inggris. Jadi administrasi adalah melayani dengan baik.

Proses seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua aparatur pemerintah yang ada di suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan negara, definisi Administrasi Publik di atas oleh Siagian yang ditulis oleh Ibrahim (2007:15). Pendapat ini diperkuat oleh "Ikeh The Liang Gie" yang menyatakan bahwa administrasi public adalah proses penyelenggaraan usaha kerjasama yang ada pada suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan akhir. Ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks karena pada

ilmu ini memuat mengenai semua bidang kehidupan masyarakat terutama yang bersifat dinamis. Hampir sama dengan definisi ini “jika dalam kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya, begitu juga dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrator publik maka juga semakin kompleks.” Oleh Chandler dan Plano dalam Keban (2008:8)

1.6.2 Unsur-Unsur Administrasi Publik

Dewi (2011:10) yang tertulis pada Buku Pengantar Ilmu Administrasi, bahwa Administrasi publik mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan tujuan adanya unsure tersebut untuk menunjang tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berikut unsur-unsur yang dimaksud :

- a. Organisasi. Organisasi adalah kegiatan kelompok yang saling menjalin hubungan kerjasama antar para anggota kelompok dalam menyusun sebuah kerangka kerja terhadap suatu lingkungan untuk mereka mencapai tujuan bersama.
- b. Manajemen. Manajemen merupakan sesuatu hal yang dapat mengatur atau mengelola suatu kegiatan yang berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, membina, membimbing, menggerakkan, mengawasi dan mengarahkan anggota agar tujuan bersama mereka dapat tercapai.
- c. Komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan berita, pemberian ide, pemberian gagasan yang didapat dari seseorang yang nantinya akan disampaikan ke orang lain sehingga akan menimbulkan hubungan timbal balik dan mewujudkan kerjasama.
- d. Personalia. SDM yang mengatur dan mengurus keberjalanan orrganisasi.

- e. Keuangan. Pembiayaan untuk sebuah organisasi dengan adanya tambahan bantuan finansial dalam kerjasama.
- f. Perbekalan. Perbekalan sangat berkaitan dengan penggunaan alat-alat untuk keperluan kerja dalam usaha pekerjaannya.
- g. Humas. Hubungan Masyarakat kegiatan ini dapat membangun hubungan dengan masyarakat sekitar untuk menciptakan kerjasama dengan organisasi.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Suwitri (2008) menjelaskan bahwa terdapat paradigma-paradigma dalam administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Publik dan Administrasi tahun 1900-1926. Bahwa Frank J Goodnow mengemukakan dengan membedakan 2 fungsi antara politik dengan administrasi. Fungsi politik merupakan fungsi yang berkaitan dengan adanya suatu penetapan kebijakan di suatu negara sedangkan fungsi administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pada fungsi politik. Perbedaan yang khas dalam paradigma ini yaitu adanya pembagian kekuasaan.
2. Paradigma sebagai prinsip administrasi tahun 1927-1937. Adanya Paradigma ini dapat menjadikan pencapaian tujuan negara bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Mengutip Suwitri (2008), menyebutkan bahwa W.F Willoughby pada bukunya "*Principles of Public Administration*" menuliskan adanya prinsip-prinsip administrasi negara didalam setiap organisasi manapun. Adanya paradigma ini merupakan pertentangan paradigma yang pertama yang menilai bahwa administrasi negara tidak hanya nilai namun menyebutkan bahwa administrasi negara juga merupakan teori politik.

3. Paradigma sebagai Ilmu Politik pada tahun 1895-1970. Adanya hubungan yang hadir diantara administrasi negara dengan ilmu politik tidak dapat dipisahkan karena ruang lingkup ilmu administrasi negara adalah ilmu politik sehingga administrasi negara disama artikan dengan bagian ilmu politik dengan istilah "*warga negara kelas dua*".
4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Publik tahun 1956-1970. Dalam paradigma ini mulailah ruang lingkup baru didalam ilmu administrasi publik yaitu dengan adanya gabungan antara teori organisasi dengan ilmu manajemen yang didalamnya akan memuat prinsip-prinsip yang bersifat universal pada organisasi public.
5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara digunakan tahun 1970 hingga sekarang. Menuliskan bahwa administrasi negara menjadi administrasi yang terdapat dan fokus pada organisasi public.

Selain kelima paradigma di atas, dalam administrasi publik sendiri memiliki beberapa paradigma yang lain, yaitu:

a. *Old Public Administration (OPA)*

Menyarankan untuk administrasi publik supaya dipisah dengan dunia politik karena didalam pengalamannya bahwa Negara terlalu memberika peluang kepada Administrator sehingga membuat mereka untuk mempraktekan sistem nepotisme dan spoil .Pertama kali dikemukakan oleh "Woodrow Wilson

Adanya sistem ini membuat mereka mengeluarkan doktrin, adanya doktrin tersebut dikerluarkan untk memisahkan dunias legilatif (politik) dengan dunia eksekutif. Beliau juga menjelaskan untuk para administrator sekarang selalu lebih

mengutamakan nilai efisien dan menjunjung ekonomis dengan meniru dunia bisnis. Adanya konsep Paradigma Opa mempunyai tujuan untuk melaksanakan tujuan dan memberikan pelayanan.

b. New Public Manajemen (NPM)

New public manajemen adalah pendekatan yang ada pada administrasi public yang didalamnya mengutamakan dan menerapkan pengetahuan kedisiplinan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan public pada birokrasi modern dalam dunia manajemen bisnis.

c. New Public Service (NPS)

Paradigma ini memandang bahwa birokrasi sebagai alat rakyat yang harus tunduk kepada suara rakyat. Paradigma NPS ini menjelaskan bahwa semuanya harus ikut berkontibusi dan terlibat tidak hanya menjadi penonton saja. Pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik baru seharusnya dijalankan seperti layaknya perusahaan tetapi tetap melayani masyarakat secara adil, merata, demokratis, jujur, akuntabel pernyataan di atas dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt.

Mereka diwajibkan untuk menjamin hak-hak warga masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab mereka kepada masyarakatnya, tidak hanya itu Pemerintah juga harus mengutamakan kepentingan warga masyarakatnya. "*Citizens First*" adalah julukan dan pegangan oleh Denhardt dan Gray, 1998.

Saat ini paradigma Administrasi Publik di Indonesia sudah bergeser menjadi paradigma good governance. Menurut Suwiti (2008), paradigma *good governance* alasan pergeseran paradigma ini adanya keselarasan antara NPM dan NPS

dengan cara wirausaha birokrasi yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip pemerintah yang baik, atau dengan kata lain saat ini berada pada paradigma *New Public Service*.

Adanya penjelasan mengenai administrasi serta administrasi negara maupun administrasi publik, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai reformasi perubahan dari administrasi negara yang mengalami perkembangan secara luas dan sesuai dengan tuntunan dimandidalamnya terdapat fungsi pelayanan yang dilakukan atas tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat, swasta.

1.6.4 Manajemen Publik

Ilmu administrasi publik memuat banyak sekali cakupan kehidupan manusia dan sangatlah kompleks. Secara khususnya administrasi publik terbagi menjadi dua bagian yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. **Definisi oleh Ott, Hyda dan Shafritz (Keban2008:93)** menuliskan bahwa “Ilmu Manajemen Publik dan Ilmu Kebijakan Publik merupakan dua bidang dari Administrasi Publik yang saling bersangkutan dan tumpang tindih”

Definisi manajemen menurut Malayu (2001:1) yaitu proses-proses yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi Stoner (Handoko tahun 2009:8) menjelaskan bahwa Ilmu Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang didasari dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan pada kegiatan-kegiatan anggota organisasi dalam memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang ada dalam sebuah perusahaan untuk mereka mencapai tujuan awal dan sasaran yang telah ditetapkan pengertian tersebut dicetuskan oleh Ritonga (2006:100). Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian menurut para ahli Manajemen Publik adalah proses manajerial yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi pada saat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan sumber daya yang dimanfaatkan.

Fungsi-fungsi Manajemen Publik

Menurut Malayu (2001:40-41) dalam manajemen terdapat fungsi yang dijalankan sehingga tujuan yang ada dapat dilaksanakan yang diadopsi dari fungsi-fungsi manajemen publik menurut George R. Terry, antara lain:

1. Perencanaan (*planning*), proses awal dalam menentukan tujuan dan pedoman pelaksanaan dan mencari sebuah alternatif keputusan.
2. Pengorganisasian (*organizing*), proses penentuan, pengaturan organisasi untuk membagikan tugas maupun mendelegasikan wewenang tersebut berdasarkan sumber daya yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengarahan (*actuating*), tahapan dimana pimpinan melakukan arahan kepada bawahan sehingga dapat bekerja efektif dan efisien dan mampu terjalin kerjasama antara satu anggota dengan anggota yang lain.
4. Pengendalian (*controlling*), evaluasi dari hasil pengawasan. Dalam tahap ini dilakukan adanya pengukuran serta perbaikan terhadap pelaksanaan kerja yang sudah dilakukan.

Adapun 4 prinsip dasar manajemen publik menurut Woodrow Wilson yang diterapkan sampai saat ini, antara lain: Pemerintahan sebagai setting utama organisasi, Fungsi esektif sebagai fokus utama dalam manajemen public, Prinsip manajemen public kunci utama dalam mengembangkan kompetensi administrasi, (Keban 2008:100) adanya metode perbandingan digunakan studi perbandingan administrasi publik.

Unsur-unsur Manajemen Publik

Dalam mencapai sebuah tujuan dalam organisasi publik diperlukan alat atau unsur dari manajemen sebagai pendukung dalam melakukan aktivitas didalamnya. Menurut Masry Simbolon (2003), alat tersebut disebut dengan 6M antara lain “Man,Money,Materials,Machines,Method,Markets”

1. *Man* (Manusia). Unsur paling utama dalam pembuatan tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan. Karena mereka yang akan menggerakkan organisasi dengan manajemen.
2. *Money* (Uang). Unsur ini menjadi alat tukar yang dapat membantu untuk menopang keberjalanan organisasi.
3. *Materials* (Bahan). Bahan merupakan suatu hal yang hendak diolah di dalam sebuah organisasi.
4. *Machines* (Mesin). Alat yang digunakan untuk mengolah bahan sehingga dapat menciptakan efisiensi kerja.
5. *Methods* (Metode). Cara kerja dalam organisasi dengan melakukan beberapa strategi yang dirasa paling efisien untuk mencapai tujuan bersama.
6. *Market* (Pasar). Tempat untuk melakukan pemasaran hasil dari pengolahan bahan atau hasil produksi.

1.6.5 Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Horton dan Hunt peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Teori Peran memberikan dua harapan Pertama Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam

menjalankan perannya. Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhungan untuk mendapatkan reward atau imbalan.

Pengertian dari Paul B. Horton, Chester L. Hunt dalam buku yang berjudul Sosiologi mengatakan bahwa Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Menurut Paulus Wirutomo dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi David Berry mengatakan bahwa, Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dalam pandangan ini, peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-peranan lain, yang diciptakan oleh masyarakat bagi manusia.

1.6.6 Teori Peran Pemerintah

Sementara itu Gede Diva (2009) menyatakan bahwa Peran Pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, kasalitor.

a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator.

Peran Pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi IKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki IKM. Jika IKM mempunyai kelemahan dibidang produksi misalnya, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan IKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikianpula jika IKM lemah dalam hal penandaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar IKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, akan tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi IKM menjadi tidak tergantung.

b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator.

Pemerintah sebagai Regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha IKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai kondisi

lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan-kebijakan tentang aturan persaingan usaha misalnya. Pemerintahan adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi 2 yaitu wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, Pemda juga mempunyai fungsi pengaturan masyarakat yang ada di daerahnya.

c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Secara katalisator adalah zat yang ditambah kedalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan IKM adalah mempercepat proses berkembangnya IKM menjadi fast moving enterprise Fast moving enterprise ini sendiri artinya adalah IKM yang telah ada dan memiliki jiwa kewirausahaan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan tersebut pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlihat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya.

1.6.7 Teori Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Edi Suharto mengemukakan pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu :

- 1) Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
- 2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupa mengeksploitasi.
- 4) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
- 5) Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

1.6.8 Indikator Pemberdayaan

Pemberdayaan IKM tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat yang tidak memiliki usaha, namun juga diharapkan dilakukan untuk menumbuhkan berbagai usaha baru dengan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh.

Sunyoto Usman (2004) mengungkapkan pendapatnya bahwa keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta yang mempunyai 5 indikator pokok :

- A. Bantuan dana sebagai modal usaha. Modal usaha yang diberikan Pemerintah untuk masyarakat dalam awalnya membuka usaha mereka.
- B. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat. Prasarana dalam pemberdayaan IKM tentu sangat diperlukan sekali, guna mendukung kegiatan-kegiatan social pelaku usaha IKM.
- C. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa. Penyediaan saran dalam bidang pemberdayaan IKm sangatlah diperlukan guna untuk memperbaiki pemarkan pada produksi IKM.
- D. Pelatihan sosial bagi ekonomi masyarakat. Untuk memajukan IKM tentunya dibutuhkan pekatihan-pelatihan guna mendongkrak keahlian para pelaku usaha IKM agar hasil produksi lebih berfariasi, lebih bagus tentunya lebih berkelas. Sehingga mampu bersaing dengan IKM IKM lainnya.
- E. Penguatan Kelembagaan. Yang dimaksud disini adalah bagaimana IKM itu mengurus manajemen sendiri, contoh dalam pembukuuan, struktur organisasi, serta bagaimana mereka mentaati adanya aturan kebijakan yang berlaku.

1.6.9 Pemberdayaan IKM

Upaya untuk memberdayakan IKM dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut. Perlu juga dipahami apa potensi yang bisa dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasannya yang bisa menjadikan daya tarik dan diferensiasi bagi produk kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu diperhatikan potensi local dan kearifan-kearifan local. Hal ini jika dipertahankan justru akan menjadi daya tarik tersendiri.

Pemberdayaan IKM tidak hanya dilakukan untuk menumbuhkan berbagai usaha baru dengan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh. Pembentukan kelompok IKM sangat perlu dilakukan, hal ini akan menguatkan kerjasama baik dalam produksi, pemasaran, serta meningkatkan daya saing. Melalui kelompok juga akan memudahkan dalam akses perbankan dan mengikuti berbagai program pemerintah yang sudah disediakan.

1.6.10 IKM (Industri Kecil Menengah)

Kegiatan yang kebanyakan didominasi dengan usaha kecil dan perlu perlindungan kebijakan hukum perlu juga ditingkatkan untuk mencegah adanya saingan-saingan usaha yang lebih besar, kegiatan ini perekonomiannya masih berskala kecil, Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998. Kriteria Industri Usaha Kecil menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah :

1. Pendapatan bersih paling besar adalah dua ratus juta rupiah pendapatan itu tidak termasuk dengan tanah dan bangunan
2. Pendapatan hasil dari penjualan paling besar Satu Miliar Rupiah pertahunnya

3. Usaha industri kecil ini terberntuk sendiri dari orang perorangan

Menurut Badan Pusat Statistik IKM dinilai berdasar perhitungan tenaga kerja industri kecil mempunyai jumlah 5-19 tenaga kerja, lalu untuk usaha menengah memiliki 20-99 tenaga kerja. Industri kecil dan menengah yang disingkat ikm merupakan bagian dari usaha rumah tangga dan dikelola secara sederhana dan masih terbatas dalam pengelolaannya lalu untuk karyawan biasanya masih diambil dari keluarga atau melibatkan saudara dan tetangga terdekat. Berikut adalah termasuk golongan industri kecil :

1. Adanya industri yang fokus pada pangan, seperti makanan minuman dan tembakau.
2. Industri-industri yang berfokus pada sandang dan kulit biasanya berupa pembuatan tekstil, pembuatan pakaian jadi dan barang yang berasal dari kulit.
3. Industri yang mempunyai cirri khas dengan kerajinan misalnya rotan, kayu, logam dan bamboo.
4. Logam, Industri yang termasuk industri logam seperti mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya.

1.7 Fenomena Penelitian

Penelitian ini, fenomena yang akan dikaji oleh peneliti yaitu Peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Mebel dan Seni Ukir Kayu, untuk memudahkan dalam pembahasan serta alur pemikiran dalam penelitian sehingga jelas.

1. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai pelaku pelayanan public yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini melihat Peran Pemerintah dari , teori yang dikemukakan oleh (Gede Diva, 2009 : 15) yaitu :

a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator.

Didaalam pengembangan IKM, peran pemerintah harus memberikan fasilitas bagi IKM Mebel dan Seni Ukir Kayu seperti menyediakan pelatihan dan pendanaan.

b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada unit IKM Mebel dan Seni Ukir Kayu dalam pengembangan usahanya.

c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Disini pemerintah berperan sebagai stimulant untuk mempercepat perkembangan IKM dengan langkah-langkah seperti penghargaan terhadap IKM, Komunitas

Kreatif untuk produktif bukan konsumtif, prasarana intelektual, bagi IKM dan permodalan termasuk modal bergulir.

Pada penelitian ini peran pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.

2. Pemberdayaan IKM.

Suatu bentuk yang dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut. Perlu juga dipahami apa potensi yang bisa dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasannya yang bisa menjadikan daya tarik dan diferensiasi bagi produk kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu diperhatikan potensi local dan kearifan-kearifan local. Hal ini jika

Indikator Pemberdayaan menurut Suntouy Usaman (2004) mengungkapkan pendapatnya bahwa keberhasilan dalam Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta memiliki 5 indikator yaitu :

- a. Bantuan dana sebagai modal usaha
- b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat.
- c. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa.
- d. Pelatihan sosial bagi ekonomi masyarakat.
- e. Penguatan Kelembagaan

Tabel 1.2

Fenomena Penelitian

Fenomena	Teori	Fenomena yang akan dikaji oleh Peneliti	Pertanyaan
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan IKM	Teori Peran Pemerintah	a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator. Didaalam pengembangan IKM, peran pemerintah harus memberikan fasilitas bagi IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Pemerintah sebagai fasilitator dan bagaimana peran IKM untuk perekonomian? 2. Fasilitas apa yang diberikan Pemerintah untuk pengembangan IKM Mebel dan Seni Ukir Kayu? 3. Fasilitas tersebut diberikan kepada siapa? 4. Apa manfaat dari pemberian fasilitas itu? 5. Bagaimana keberlanjutan dari fasilitas itu? Apakah akan terus diupgrade. 6. Bagaimana cara Pemerintah dalam memberikan fasilitas itu kepada pelaku usaha?
		b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator.	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk pengembangan IKM ini? b. Apakah dari semua Pelaku IKM mentaati adanya aturan hukum yang diberikan Pemerintah?
		c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dalam pemberdayaannya mengembangkan IKM ini? 2. Apa saja bentuk langkah-langkahnya? 3. Apakah ada kendala dari langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut?

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan IKM	Indikator Pemberdayaan	a. Bantuan dana sebagai modal usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dana seperti apa yang diberikan pemerintah kepada Pelaku IKM? 2. Bagaimana pelaksanaan bantuan dana tersebut yang akan digunakan sebagai modal usaha?
		b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian fasilitas apa yang diberikan Pemerintah untuk dapat menunjang kegiatan IKM serta dapat memamerkan hasil produk mereka ? b. Apa saja peralatan perlengkapan yang sering diberikan Pemerintah? c. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait fasilitas ini, apakah pelaku IKM merasa terbantu? d. Lalu bagaimana syarat yang dilakukan agar pelaku IKM dapat menerima fasilitas ini?
		c. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran seperti apa yang dipilih Pemerintah dalam memamerkan hasil produk IKM? 2. Dalam produksinya pemerintah memperbaiki kualitas produksi atau memperbanyak produksi? 3. Apakah pemasaran tersebut dapat berjalan dengan lancar? 4. Sarana apa saja yang disediakan Pemerintah dalam membantu promosi pemasaran? 5. Apakah dari pelaku usaha IKM mengalami kesulitan dalam hal tersebut?
		d. Penguatan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana peran Pemerintah dalam memberikan bimbingan terkait kelembagaan IKM?

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan IKM	Faktor Pendukung Faktor Kendala	Pemerintah Ikon daerah masing-masing Sumber Daya Manusia Modal Ketersediaan peralatan produksi Desain kemasan produk.	1. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ini? 2. Apa ketersediaan Pemerintah?
---	--	--	---

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dengan judul “ **Peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Mebel dan Seni Ukir Kayu**” peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasi kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini akan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada, bahwasannya penelitian deskriptif kualitatif ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara sedang berlangsung.

Marshall dan Sarwono (2006:193) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia”. Lalu metode deskriptif yang didefinisikan oleh Naziir (2013:43), menjelaskan “metode deskriptif merupakan suatu

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian menentukan situs penelitian atau lokasi penelitian bertempat diDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yang berlokasi diPanggung I, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59411.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian penting kedudukannya yang digunakan dalam pengumpulan data baik berupa benda maupun manusia. Dengan kata lain subjek penelitian merupakan suatu fokus yang sudah dilakukan dikemudian hari. Informan/narasumber untuk subjek penelitian ini ditentukan dari tingkatan kepentingan terhadap permasalahan yang diteliti tentang bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan IKM.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi tentang peran Pemerintah Kabupaten Jepara yang diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaanya mengembangkan pelaku IKM Mebel dan kerajinan ukir kayu. Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat maka subjek dalam penelitian antara lain :

1. Kasi Industri Logam,Mesin,Energi dan Aneka. Peneliti memilih Kasi industri tersebut karena Industri Mebel dan Kerajinan Ukir Kayu termasuk ke dalam kategori “Aneka” .
2. Staf Perindustrian, Peneliti memilih anggota karena anggota tersebut yang berfokus untuk meneliti kerajinan kayu dan ukir kau. Anggota ini dipilih Kasi ILMEA untu membantu dalam melaksanakan tugasnya

3. Masyarakat. Masyarakat disini merupakan Suplayer, pekerjayang masuk dalam industry furniture dan kerajinan ukir kayu yang berada di Jepara.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data ini merupakan data berupa kalimat-kalimat penjelas, berupa tulisan, maupun pendeskripsian kenyataan-kenyataan yang ada di atau kata lain data yang digunakan untuk penelitian ini adalah bentuk deskriptif.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian dengan judul“ **Peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Mebel dan Seni Ukir Kayu**” memiliki sumber data.Berikut sumber data yang diterapkan dalam penulisan ini adalah primer dan sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Daa Primer. Data yang diperoleh langsung dari objek yang hendak dituju dan berupa jawaban atass daftar pertanyaan yang dilakukan selama proses wawancara, data diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian yaitu Kasi ILMEA dalam DisperindagKabupaten Jepara, serta staf perindustrian yang berfokus pada kerjinan kayu, mebel yang terakhir adalah masyarakat.
2. Data Sekunder. Sumber yang didapat tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data yang bersumber menggunakan dokumen-dokumen, buku, dan artikel pendukung lainnya. Data yang digunakan dalam penelitan ini merupakan regulasi perda,penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha IKM.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut John W. Creswell langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang berstruktur maupun tidak, dokumentasi-dokumentasi dan lain-lain. Dalam penelitian ini, pengumpul data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Observasi. Pada pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan tersruktur maupun tidak dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti.
- b. Wawancara. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi diperoleh untuk mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, catatan-catatan, laporan, foto, video
- d. Studi Kepustakaan. Pengumpulan dan data informasi dai berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal. Studi kepustakaan yang digunakan peneliti seperti artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan peran pemerintah dan indikator pemberdayaan..

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Burhan Bungin (2007:154) adanya data informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji dengan mempertimbangkan derajat koherensi internal yang masuk akaldan berhubungan dengan peristiwa yang benar dan nyata. Pada tahapan analisis data bagiab yang sangat penting dimana bagian ini merupakan bagian proses dari suatu penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif.

Buku Burhan Bungin “Analisis Data Penelitian Kualitatif,2010” menuliskan bahwa menurut Huberman dan Miles teknik analisis ini terdiri dari 3 kegiatan secara bersamaan yaitu reduksi data,penyajian data, serta penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi Data. Merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menggolongkan,mengarahkan,membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Data Display atau penyajian data mendeskripsikan sekumpulan informasi yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian kualitatif disajikan dalam teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan,Display data ini dilakukan dengan memaparkan data dengan memilih inti informasi.
3. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti,mencatat penjelasan-penjelasan dari alur sebab akibat. Kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

1.8.8 Teknik Leabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data dapat dilakukan menggunakan teknik pemeriksaan yang berdasarkan pada kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan, keterampilan,kebergantungan dan ketidakpastian. (Burhan, 2003:173). Pada penelitian ini kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi.

Keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi data yaitu dengan memanfaatkan data sumber sumber lain diluar data yang dimaksut untuk dipakai sebagai pembanding (Moelong,2005 : 330). Menurut Denzin dan Moelong terdapat empat jenis Triangulasi, diantaranya :

1. Triangulasi Teori. Lincoln dan Guba dalam Moleong dilakukan dengan dasar bahwa keabsahan dari suatu fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.
2. Triangulasi Penyidik. Moloeng menggunakan teknik ini dengan cara menggunakan hasil kerja dari peneliti serta pengamat lainnya dengan maksut melakukan perbandingan serta cek ulang terhadap tingkat kepercayaan dari suatu data.
3. Triangulasi Metode. Terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam melakukan triangulasi metode. Sebagai berikut: Pemeriksaan tingkat kepercayaan dari suatutdata dengan cara menggunakan data yang didapat dari beberapa sumber data dengan metode yang sama. Pemeriksaan tingkat kepercayaan dari suatu data dengan cara menggunakan temuan data dari metode yang berbeda-beda.
4. Triangulasi Sumber. Teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yng diperoleh untuk melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang diperoleh selama penelitian oleh beberapa sumber.